

Analysis of the Elimination of Fixed Assets at the Upt Office of Labor Supervision Region I of North Sumatra Province

Analisis Penghapusan Aset Tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara

Icha Puji Usti ¹⁾; Rahmat Daim Harahap ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ ichapujiusti2512@gmail.com; ²⁾ rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

How to Cite :

Usti, I. P., Harahap, R. D. (2022). Analysis of the Elimination of Fixed Assets at the Upt Office of Labor Supervision Region I of North Sumatra Province. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [23 Maret 2022]

Revised [2 April 2022]

Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

*Elimination of Fixed Assets,
Upt Office of Labor
Supervision Region I North
Sumatra Province.*

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang perlakuan akuntansi penyingkiran dan pelepasan aset yang dilaksanakan di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dan untuk mencari tahu kesepakatan antara perlakuan akuntansi penghapusan dan pelepasan aset milik negara telah sejalan sinkron dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau tidak. Obyek dari penelitian ini adalah Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara. Information penelitian ini menggunakan teknik informasi objek kualitatif yang berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan proses penghentian aset tetap daerah yang telah dilakukan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam sisi pelepasan aset tetap perusahaan di biarkan tanpa adanya pencatatan kerugian, Hal ini dikarenakan pelepasan aset pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I belum sesuai dengan PSAK 16 tentang penghapusan aset tetap.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out about the accounting treatment of disposal and disposal of assets carried out at the Office of Upt Labor Supervision Region I of North Sumatra Province and to find out whether the agreement between the accounting treatment of write-off and disposal of state-owned assets was in sync with the Statement of Financial Accounting Standards or not. The object of this research is the Upt Office of Labor Supervision Region I, North Sumatra Province. This research information uses qualitative object information techniques derived from primary data and secondary data. The results of this study indicate that in carrying out the process of terminating regional fixed assets which has been carried out by the Regional I Employment Supervision Upt Office of North Sumatra Province, it has not been in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards in terms of the disposal of the company's fixed assets without recording losses, this is due to the disposal of assets. at the Regional I Labor Supervision Upt Office not yet in accordance with PSAK 16 concerning the write-off of fixed assets..

PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah laporan yang disusun secara sistematis tentang posisi keuangan per usaha pada suatu titik waktu tertentu dan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Untuk

memenuhi persyaratan penyampaian laporan keuangan yang berkualitas, Pemerintah menerbitkan aturan yang diatur dan mengatur tentang penyampaian Ordonansi Laporan Keuangan 2010 atau Peraturan Pemerintah No. 71. (Hadisaputro, Aditya, & Hermawansyah, 2019)

Aset tetap yang dimiliki instansi tidak dapat digunakan secara terus menerus. Aset berwujud memiliki masa manfaat yang terbatas dan tidak akan berfungsi sampai suatu hari nanti. PSAK 16 (Paragraf 67) nilai buku aset tetap yang direvisi pada tahun 2016 telah dihentikan (A) Pada saat penerbitan atau (b) Ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan diharapkan dari penggunaan dan pembuangan. Tujuannya adalah untuk merujuk pada pelaku akuntansi pemerintah pusat dan daerah di negara. Auditor yang mengomentari apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memasukkan neraca dalam rekening tahunan masing-masing pemerintah pusat daerah. Pengenalan aset, penilaian, penyajian dan pengungkapan terus menjadi fokus, karena aset mempertahankan nilai dan kompleksitas yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam Informasi No. 09 (KSAP) tentang Akuntansi Aktiva Tetap oleh Badan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagaimana seharusnya akuntansi aset tetap diperlakukan sehubungan dengan hal-hal yang harus ditangani pemerintah mengenai keberadaan aset tetap? Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan aset tetap pemerintah, yang penghapusannya dapat mempengaruhi keseimbangan pemerintah. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesesuaian standar akuntansi dengan standar akuntansi pemerintah untuk penyusutan dan penyajian, pengungkapan, dan penilaian aset tetap yang dilepaskan.

Masalah lain yang terjadi di kota dan negara lain yang mempengaruhi penilaian opini BPK tentang akuntansi pemerintahan: aset yang diperoleh tanpa nilai rupiah, aset yang rusak tidak diamortisasi ke pembukuan, aset yang sesuai diamortisasi tanpa prosedur dan aset yang dialihkan tanpa proses yang benar. Masalah penangguhan dan pengalihan aset tetap, tidak diketahui sumber aset tetap, aset terdaftar untuk diamortisasi, tidak ada bentuk fisik dari aset tersebut, hilang karena kelalaian atau perampokan pengguna barang aset, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pekerjaan dan penghapusan aset tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumatera Utara. Penulis percaya bahwa masalah ini perlu diselidiki lebih lanjut.

LANDASAN TEORI

Persepsi Akuntansi

Pada dasarnya, Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang diberikan kepada pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi akuntansi dalam hasil dan kondisi jasa keuangan suatu perusahaan. Akuntansi Keuangan adalah departemen akuntansi yang mengajarkan Anda langkah-langkah dan metode merancang dan membuat laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Aset Tetap

Aset didefinisikan sebagai barang atau bisa juga dikatakan barang dengan nilai ekonomi, komersial atau pertukaran. Seluruh aturan pada perusahaan memiliki aset untuk menjalankan aktivitasnya. (Amri, Aladin, Mubarak, & Irwandi, 2022)

Aset tetap adalah aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dengan waktu lebih dari setahun dan memiliki manfaat yang layak yang semakin lama nilai barang tersebut semakin menyusut atau menurun.

Akuntansi Untuk Aset Tetap

PSAK No. 16 Paragraf 07 mensyaratkan pengakuan bahwa aset tetap harus dibenarkan yaitu jika hanya manfaat ekonomi yang paling memungkinkan pada aset perusahaan tersebut maka biaya perolehan pada perusahaan tersebut mampu diukur secara reliable.

Unsur - unsur yang diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap berdasarkan PSAK 16 yaitu :

1. Harga pembelian, termasuk pajak impor dan penjualan, tidak dapat dikembalikan dan akan dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan diskon lainnya.
2. Semua biaya dikirim langsung karena syarat pengiriman barang ke lokasi dan penyediaan aset disinkronkan dengan pihak pengelola.

Administrasi Aset

Administrasi Aset meliputi seluruh proses - proses di awali perencanaan hingga penghapusan, kebutuhan aset ini selama hidup digunakan oleh organisasi atau lembaga. (Anugraini & Puryandani, 2021)

Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan adalah penghapusan pemilik property dari daftar produk sesuai dengan hukum dari Sekretaris untuk manajer real estate dan pengacara. Pengguna barang bertanggung jawab atas aset tersebut secara administratif dan fisik yang termasuk dalam kewenangannya.

Penghapusan fisik adalah kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang berlebihan selama penggunaan aset tersebut dan penyebab kerusakan alami lainnya, seperti terkena panas matahari, banjir dan lainnya. (Jayanti, Soemitro, & Suprayitno, 2019)

Penghapusan fisik antara lain disebabkan oleh kerusakan struktur, retakan dan kekeringan. Penghapusan fisik juga dapat dihitung menurut peraturan yang berlaku. Setiap aset yang digunakan oleh perusahaan seperti digunakan terus menerus dapat mendevaluasi, sehingga mengurangi utilitas dan kegunaan aset yang semakin lama berkurang. Jika properti, pabrik dan peralatan tidak lagi diperhitungkan atau rusak karena kurangnya penggunaan ekonomi, aset tetap harus dihentikan, dijual, disewakan kepada orang lain, atau ditukar dengan aset baru.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta, tetapi tidak menguji hipotesis.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data objek kualitatif dari data primer dan data sekunder. Sumber data - data kunci untuk penelitian ini disuplai langsung oleh pihak - pihak yang terkait langsung atau terlibat langsung dalam aset tetap Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara dengan kegiatan pemeliharaan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, laporan hasil Audit LTD, dan seterusnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dalam wawancara ini yaitu Ka. Sub Bagian Tata Usaha Septinawati Naipospos, SH yang menangani aset tetap. Analisis dokumen dilakukan untuk menggabungkan data dari arsip dan dokumen aset tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, mampu menganalisis data diambil dari lapangan, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari analisis data ini adalah mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau karakteristik data dapat dengan mudah memahami dan membantu dalam menanggapi masalah berhubungan dengan penelitian.

Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara yang berada di jalan Jl. William Iskandar No.331, Sidoarjo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Responden diambil dari 1 orang yang berkopeten di bidangnya yaitu Ibu Septinawati Naipospos, S.H selaku Pembimbing di Instansi/Kantor serta menjabat sebagai Kasi. Sub Bagian Tata Usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktiva tetap yang dimiliki instansi tidaklah sedikit dan memerlukan kehati-hatian yang besar dalam menangani aktiva tetap tersebut, sehingga diperlukan perencanaan yang tepat oleh instansi dalam menangani aktiva tetap tersebut. Dengan kata lain, dari perolehan aset tetap hingga penjualan. Penanganan yang tepat saat menyajikan laporan keuangan aset tetap juga sangat bermanfaat bagi manajemen, termasuk pelaporan yang lebih akurat oleh pemangku kepentingan dan informasi keuangan yang andal sehingga dapat digunakan untuk keuntungan agensi dan pengambilan keputusan.

Penghapusan adalah aset dari daftar produk dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dari pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna atau agen pengguna atau administrator untuk melepaskan tanggung jawab administratif dan fisik barang yang berada di bawah kendalinya. (Toisuta, Kalangi, & Pangerapan, 2019)

DPPKAD Kota Medan telah mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran IX Tentang Akuntansi Aset Tetap, yaitu: 1) Tanah, 2) Peralatan dan Mesin, 3) Gedung dan Bangunan, 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 5) Aset Tetap Lainnya

Bukti kepemilikan aset sangat berharga karena hal tersebut berkaitan dengan hak untuk melakukan penggunaan aset tetap. Aset tetap di Kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ternyata tidak semua orang memiliki bukti kepemilikan aset yang akurat.

Manfaat bukti memfasilitasi kepemilikan real estat pengguna aset untuk menentukan nilai aset tetap, nilai-nilai ini digunakan untuk menganalisis situasi keuangan pemerintah. Hasil analisis ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Opini yang ditentukan oleh BPK pada tahun 2012 dan 2013 sampai saat ini belum ada tindakan yang diambil oleh pemerintah yaitu konsolidasi aset tetap, yang menyebabkan masalah pada proses penghapusan aset tetap di suatu daerah tersebut. (Siahaan, Zaidiah, & Isnainiyah, 2021)

Metode penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi aset yang ingin dihapuskan dengan alasan penghapusan beserta kelengkapan dokumen.
2. Pengelola aset merekomendasikan agar aset tetap yang dihapuskan kepada implementasi aset.
3. Penerapan aset mengklarifikasi sebuah alasan penghapusan aset, sebab Overmacht (keadaan memaksa) atau tidak.
4. Tim pengumpul memeriksa barang yang akan dihapus. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah item atau aset yang akan dihapus berhak dihapus atau tidak. Aset tersebut dihapuskan melalui survey tersebut.
5. Tim yang bergerak membuat laporan insiden, dilakukan berdasarkan hasil survey dan daftar pertanyaan.
6. Tim pemeriksa penghapusan aset tetap melakukan catatan laporan terpaut dengan hasil survey.

7. Melaporkan catatan usulan penghapusan aset tetap kepada Dinas Ketenagakerjaan.
8. Jika Dinas Ketenagakerjaan menyetujuinya, maka harus dikeluarkan SK yang terpaut dengan penghapusan aset tetap.

Proses penerapan penghapusan aset tetap tidak ada waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan. Aset tetap dihapus setelah pendaftaran SKPD penghapusan aset dapat disusutkan selama satu tahun. Penghapusan aset tetap dapat dilakukan tiga sampai empat kali.

Analisis Penghapusan Aset Tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara prosesnya masih berlangsung karena masih sulitnya mencari aset yang sudah ada sebagai aset yang hilang atau rusak beberapa tahun terakhir, Sistem informasi diperlukan untuk menghapus data secara elektronik dan menjamin keamanan penyimpanan data.

Aset tetap yang dihapuskan pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh instansi. Seluruh pengelola barang mampu meninjau dan memilah aset tetap mana yang harus dihapuskan dari buku-buku instansi agar tidak menyebabkan biaya perawatan yang cukup besar. Jurnal yang sudah diterapkan pada pembukuan aset bagian aset tetap pada wilayah yang diperoleh dan dilepaskan Harus sesuai dengan SAP.

Diperlukan SOP penghapusan aset tetap di Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara yang harus dijelaskan secara individual sesuai dengan klasifikasi aset tetap untuk memfasilitasi eliminasi. Oleh karena itu, dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) agar peneliti dapat melakukan penilaian Akuntansi untuk penghentian aset tetap tersebut.

Aset tetap pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara harus dihapuskan apabila aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat untuk instansi, contohnya seperti mobil dinas yang ada pada kantor sebaiknya dihapuskan saja, sebab mobil tersebut tidak pernah digunakan oleh kantor. Sedangkan aset yang masih layak dan masih bermanfaat harus tetap dipergunakan oleh kantor.

Saat penghapusan aset tetap tidak selamanya berjalan dengan proses yang baik. Banyak sekali hambatan serta kendala dalam proses penghapusan aset tersebut yang dirasakan oleh tim pengelola sumber daya regional, dalam penghapusan aset tetap yang bersifat representati untuk melakukan proses ini. Rintangan atau halangan misalnya, butuh beberapa waktu yang cukup lama pada penghentian dan pelepasan item - item aset tetap tersebut. Waktu yang relatif lama inilah dapat menciptakan masalah baru dalam proses penghentian dan pelepasan aset tetap tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Pelepasan Pengakuan Dan Penghapusan Aset Tetap

Pengakuan dan pelepasan aset tetap berdasarkan PSAK 16.	Pengakuan dan penghapusan aset tetap pada Kantor UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.	Sesuai
Pelepasan aset tetap dilakukan berbagai cara misalnya : di biarkan/dibuang.	Penghapusan aset tetap perusahaan di lakukan dengan cara di biarkan/dibuang.	Sesuai
Kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan,	Penghapusan aset tetap perusahaan di buang dan dibiarkan tanpa mendaftarkan kerugian.	Belum Sesuai

Berdasarkan pelepasan pengakuan dan perbandingan penghapusan aset tetap di atas, penghapusan aset tetap dilakukan oleh perusahaan dengan cara exit atau pelepasan sesuai dengan PSAK No. 16, tetapi mencatat kerugian akibat penghapusan aset tetap perusahaan tidak memenuhi PSAK No.16.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disampaikan pada hasil dan pembahasan, kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan

Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dikelola dengan baik, dengan menggunakan cara pencatatan secara manual di buku besar, dalam melakukan proses penghentian aset tetap daerah yang telah dilakukan oleh Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Utara belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dalam sisi penghapusan aset tetap perusahaan di biarkan tanpa adanya pencatatan kerugian, Hal ini dikarenakan pelepasan aset pada Kantor Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I belum sesuai dengan PSAK 16 tentang penghapusan aset tetap.

Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penelitian ini adalah bahwa beberapa penelitian harus dilakukan terlebih dahulu untuk membuat keputusan yang tepat sebelum mengambil tindakan untuk mendepresiasi aset. Apakah kantor mengamortisasi atau memperbaiki properti? Penghapusan aset tetap dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode biaya perolehan, yang menentukan taksiran jumlah aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. N., Aladin, Mubarak, H., & Irwandi, M. (2022, Januari-Juni). PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI) Vol. 11, No. 1 P-ISSN: 2085-2401 E-ISSN: 2776-074X*, 1409-1419.
- Anugraini, P. S., & Puryandani, S. (2021). IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN ASET TETAP DAN ASET TIDAK BERWUJUD STUDI KASUS PADA BPPKAD KABUPATEN BLORA TAHUN 2019. *Jurnal Magisma Vol. IX No. 1, ISSN: 2337778X, E-ISSN : 2685-1504*, 82-26.
- Hadisaputro, E. L., Aditya, C., & Hermawansyah, A. (2019, April). Analisis Sistem Informasi Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Sistem Informasi Volume 2 Nomor 1*, 29-36.
- Jayanti, R. S., Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2019, Maret). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya). *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri Vol. 4 No. 1, ISSN: 2541-018046*, 46-57.
- Siahaan, T. L., Zaidiah, A., & Isnainiyah, I. N. (2021, September 15). Sistem Pendukung Keputusan Penghapusan Aset Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Web Pada PT. Andaru Arti Agung. *Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA) e-ISBN 978-623-93343-4-5*, 590-599.
- Toisuta, E., Kalangi, L., & Pangerapan, S. (2019). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PELEPASAN DAN PENGHENTIAN ASET TETAP PADA PT. X. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1)*, 27-35.